



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM  
DALAM PENERTIBKAN WARUNG REMANG-REMANG  
DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN  
PAYUNG SEKAKI DITINJAU  
DARI FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Medapatkan Gelar Sarjana  
Strata Satu S.1 Hukum Tata Negara (Siyasah) ( S.H )**



**OLEH :**

**DONALIO RAMADHANA**  
**NIM : 11624104177**

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1441 H/2020 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

yang berjudul : "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun  
Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertiban Warung Remang-Remang Di  
Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah"

Nama : Donalio Ramadhana

NIM : 11624104177

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah  
Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 1 September 2020  
Pembimbing Skripsi

*Hendri Savuti*

Hendri Savuti, M.Ag  
NIP: 19760829 200312 1 003

UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DIKELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DITINJAU DARI FIQH SYARIAH*, yang ditulis oleh :

Nama : DONALIO RAMADHANA  
NIM : 11624104177  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 19 November 2020  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Desember 2020M

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
H. Rahman Alwi, M.Ag

Setretaris  
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I  
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II  
Hedri Sayuti, M.Ag

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 196803 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertibkan Warung Remang-Remang Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.**

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat perkotaan khususnya keberadaan masyarakat yang terdiri beraneka ragam agama dan kebudayaan, maka untuk menyelaraskan agar tidak terjadinya penyimpangan maupun timbulnya penyakit masyarakat perlu adanya suatu pembentukan suatu Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk memajukan dan menjaga ketertiban umum. Salah satunya upaya dari pemerintah adalah dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Menertibkan Warung remang-remang di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian dalam populasi dan sampel (*pupose sampling*) secara keseluruhan adalah sumber data yang dikumpulkan untuk bahan penelitian.

Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur'an, hadist, dan kaidah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum dalam menertibkan warung remang-remang di kelurahan sungai sibam kecamatan payung sekaki, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait pelaksanaan peraturan ini sudah mengalami kemajuan dari segi penertiban warung remang-remang dari tahun-tahun sebelumnya. dan hambatan pelaksanaan peraturan ini adalah dari kurangnya sosialisasi, penegakan hukum yang kurang tegas, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dan lain-lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH ”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta Ayahanda Safrijon dan Ibunda Weldarasni yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk penelitian ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Untuk keluargaku tercinta, Ayahanda Safrijon dan Ibunda Weldarasni serta kakakku tersayang Yasinta Safrijolita dan adikku Sri Irma Wulandari yang sangat memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Muhajidin, S.Ag M. Ag , selaku Rektor UIN Suska Riau. Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, selaku Wakil Rektor II UIN



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suska Riau. Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph. D, selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau. Dan beserta stafnya.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum. Bapak Dr. Drs.H. Heri Sunandar. M.CL , selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. Wahidin, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Magfirah. MA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.

4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Hendri Sayuti,M.Ag. selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibuk Dra., HJ.,Irdamisraini,M.A. selaku penasehat akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.

7. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.

9. Untuk sahabat terbaikku, Fatah Jihadul Mahmud, Jarwandri Aprianto, Grup KITA, Keluarga HTN 16 dan untuk mereka yang telah menemani perjuangan ini namun tak sampai akhir.

10. Untuk Grup Konsultasi yang telah memberikan semangatnya dan rekan terbaik dalam menulis skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Sahabat seperjuanganku yang selalu memberi do'a dan semangat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi serta menjadi penyemangat terbaik bagi penulis.
2. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 17 Agustus 2020

Penulis,

**DONALIO RAMADHANA**  
**NIM. 1162410417**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kelurahan Sungai Sibam .....	15
B. Kondisi Geografis Dan Demografis Kelurahan Sungai Sibam .....	16
C. Orbitasi .....	17
D. Visi Dan Misi Kelurahan Sungai Sibam .....	18
E. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru .....	20
F. Tugas Dari Tiap Bagian Satuan Polisi Pamong Praja .....	21
<b>BAB III LANDASAN TEORI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH</b>	
A. Peraturan Daerah .....	33
B. Definisi Teori Pemerintahan Daerah .....	33
C. Pengertian Pelaksanaan .....	36
D. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum .....	38
E. Pengertian Ketertiban Umum .....	40



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Pengertian Warung Remang-Remang .....	41
G. Fiqh Siyasah Dusturiyah .....	41

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN TINJAUAN DARI FIQH SIYASAH**

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. ....	44
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertiban Arung Remang-Remang Di Wilayah Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.....	61

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

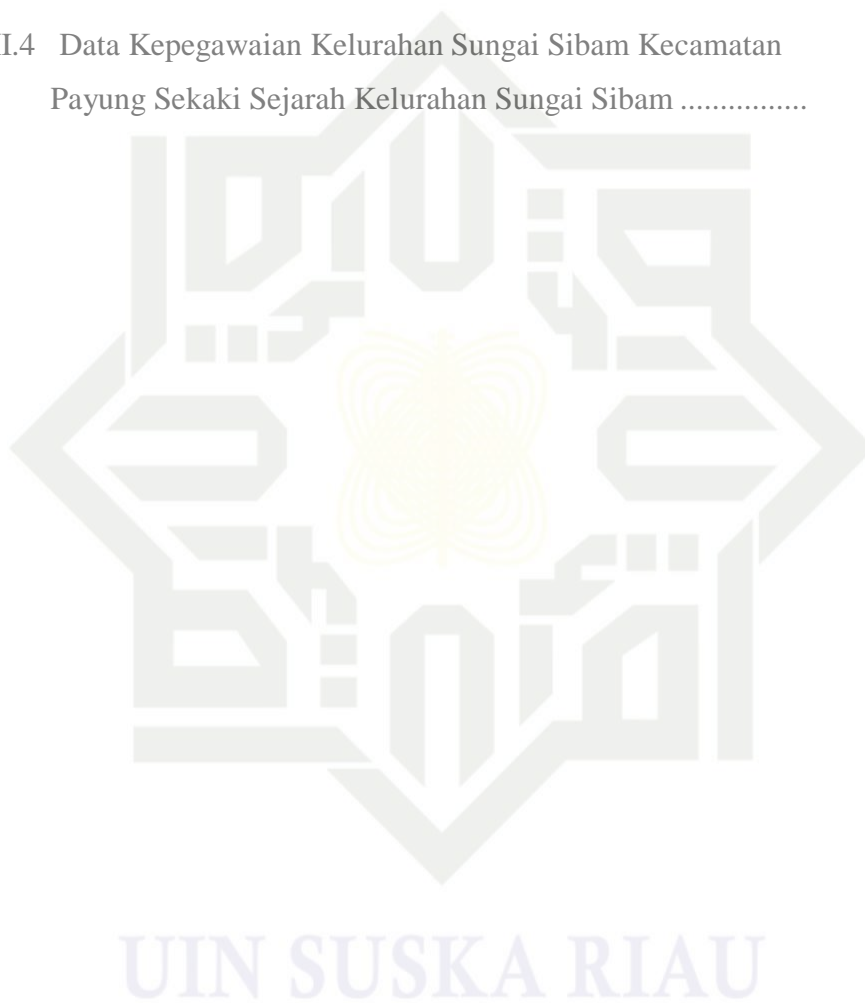
UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Penduduk Kelurahan Sungai Sibam .....	17
Tabel II.2	Sarana Peribadatan di Kelurahan Sungai Sibam .....	19
Tabel II.3	Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	19
Tabel II.4	Data Kepegawaian Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Sejarah Kelurahan Sungai Sibam .....	20





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti seluruh tingkah laku dan perbuatan masyarakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dewasa ini Indonesia sedang berada dalam transformasi dalam hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan pusat di daerah. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah telah dibuka saluran baru ( kran) bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk memanggil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada msyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini yang disebut dengan Otonomi Daerah.<sup>1</sup>

Untuk menjalankan Otonomi Daerah, maka perlu adanya peraturan yang mengatur dalam pemerintahan daerah tersebut. Yang pemerintah daerah tersebut diberi hak untuk membuat peraturan yang dinamakan Peraturan Daerah (PERDA). Dalam pasal 18 ayat 6 Undang-undang 1945 menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah berhak menerapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Peraturan Daerah merupakan produk kewenangan antara

<sup>1</sup> HAW.Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-2, hlm.1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), dan dibantu oleh beberapa instansi terkait dalam pelaksanaannya agar lebih efektif. Namun pelaksanaan Peraturan Daerah itu sendiri tidak selalu berjalan mulus, sehingga sangat diperlukan sanksi agar peraturan itu bisa berjalan dengan tegas, sanksi dalam Peraturan Daerah ini dapat berupa pidana kurungan, sanksi denda dan sanksi administratif.<sup>2</sup>

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menjaga ketertiban umum dengan tujuan untuk menanggulangi Penyakit Masyarakat. Penyakit Masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan meresahkan masyarakat serta tidak sesuai dengan aturan agama, adat istiadat dan tata krama kesopanan. Terhadap penyelesaian permasalahan tersebut, keberadaan peraturan perundang-undangan masih belum menyentuh tahap penjeratan bagi pelaku penyakit masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas, Penyakit Masyarakat adalah perilaku atau kebiasaan-kebiasaan buruk anggota masyarakat yang telah membudaya, dimana kebiasaan tersebut melanggar norma, adat dan hukum yang berlaku.

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa masalah sosial atau patologi sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Soerjono Soekanto membedakannya menjadi 4 yaitu sebagai berikut;

1. Berdasarkan faktor ekonomis, contoh: kemiskinan dan pengangguran

<sup>2</sup> Tim Redaksi, *Pemerintah Daerah Undang-Undang. Nomor.32 Tahun 2004 Beserta Penjelasannya*, ( Jakarta: Ramdina Prakarsa , 2004), cet. ke-1, hlm 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berdasarkan faktor biologis, contoh: wabah penyakit menular
3. Berdasarkan faktor psikologis, contoh: bunuh diri
4. Berdasarkan faktor kebudayaan, contoh: kenakalan remaja.<sup>3</sup>

Pemerintah Kota Pekanbaru telah berusaha menekan dan memberantas praktik penyakit sosial yang terjadi di wilayah Pekanbaru. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum di wilayah Kota Pekanbaru. Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat pasal yang secara spesifik menyatakan pelarangan terhadap perbuatan yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 24 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dilarang setiap orang melakukan atau menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan di rumah-rumah (gedung, hotel, wisma, penginapan, dan tempat-tempat usaha).
2. Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan untuk berada di jalan, taman, dan tempat umum.
3. Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, menganjurkan dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila atau perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum<sup>4</sup>

Faktanya penyakit masyarakat (PEKAT) sudah ada sejak lama di

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), cet. ke-2, hlm 177.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor. 05 Tahun 2002, *Tentang Ketertiban Umum* pasal 24.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru. Beberapa penyebab maraknya Pekat di Kota Pekanbaru adalah munculnya berbagai tempat hiburan seperti cafe, diskotik, warung remang-remang dan ada pula yang mangkal di pinggir-pinggir jalan ataupun di depan pertokoan yang dianggap aman untuk melakukan perbuatan menyimpang.

Di dalam Syariat Islam juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas para mukallaf, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), pilihan, maupun ketetapan. Hukum Islam tersebut digali dari dalil-dalil yang terperinci, yaitu al-Quran dan Sunnah, dan lain-lain yang diratifikasikan kepada kedua sumber tersebut. Disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadatnya yang merupakan perwujudan dari pengaturan Islam terhadap pemeliharaan agama, akal dan jiwa.<sup>5</sup>

Sehubung dengan prinsip negara dan agama untuk menjaga agama, jiwa dan akal, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat berperan dalam melindungi masyarakatnya. Salah satu ayat yang berkaitan dengan permasalahan ini terdapat dalam Q.S an-Nisa ayat 58, yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>5</sup> Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Islam* ( Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1, hlm 308

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “ *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.* ”

Ayat tersebut tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya al-quran mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara. dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Fiqh siyasah secara garis besar terbagi menjadi lima bagian, salah satunya adalah siyasah dusturiyah. Yang dimaksud dengan siyasah dusturiyah ialah siyasah yang membahas tentang perundang-undangan atau siyasah yang mengatur tentang dasar dan hubungan kerja sama

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesama masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>6</sup> Yang mana peran pemerintah dalam melindungi warganya.

Dalam fiqih siyasah diatur bahwa penetapan hukum islam haruslah berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga tercapailah apa yang dicita-citakan dalam aturan yang telah ada, bunyi dari kaidah tersebut adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 belum sepenuhnya dapat dipatuhi oleh masyarakat dan masih longgarnya pengawasan dari Pemerintah Daerah Kota, Camat dan Kelurahan. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan beberapa penyakit masyarakat masih penulis jumpai di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki. Penyakit masyarakat tersebut didukung dengan keberadaan warung remang-remang yang berdiri dan beroperasi di pinggir-pinggir jalan. Beberapa penyakit masyarakat yang penulis jumpai seperti minuman keras, perjudian dan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini keberadaan warung remang-remang tersebut dianggap sebagai fasilitas dari muncul dan

<sup>6</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014). cet ke-5, hlm 177-178.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembangnya penyakit masyarakat tersebut. Melihat fakta ini penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum khususnya dalam penertiban warung remang-remang. Oleh karena itu, penulis mengangkat skripsi dengan judul:

**” Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertiban Warung Remang-remang di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”**

### B. Batasan Masalah

Penulis dalam penulisan ini menerapkan batasan masalah berdasarkan latar belakang agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Penulis menetapkan bahwa dalam penulisan penelitian. Penulis hanya terfokus pada “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor. 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pasal 24 terhadap penertiban warung remang-remang di Wilayah Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2020 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah”

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor. 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor. 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Di Wilayah Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

**D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian****1. Tinjauan penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, salah tujuannya untuk menertibkan warung reman-remang di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah tentang upaya Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki.

**2. Mamfaat Penelitian**

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

**E. Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, angket dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

**2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini termasuk dalam objek penelitian, karena objek termasuk pada sifat, keadaan dari suatu benda. Maka dari itu objek dari penelitian ini berlokasi di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi ini terkait dengan upaya penerapan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketertiban Umum, salah satunya dalam menertibkan warung remang-remang di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki.

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah di jangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, salah satu tujuannya dalam menertibkan warung remang-remang.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan subjek yang hendak diteliti berdasarkan wilayah dan populasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.

Ada pun yang akan menjadi populasi dan sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut:

NO.	Nama Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase
1.	Pegawai kantor kelurahan	7 orang	7orang	100%
2	Penyuluh Konseling Penyandang Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
3	Seksi Bidang Penyelidikan dan Penyidikan satpol PP Kota Pekanbaru	2 orang	1 orang	50%
4	Kepala Bidang Operasi dan Ketrtiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
5	Pemilik warung remang- remang	11orang	11orang	100%



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Sumber dan Jenis data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang di peroleh langsung dari responden, kuesioner, wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
- b. Data sekekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>7</sup>

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- 1) Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.<sup>8</sup>
- 2) Wawancara yaitu situasi peran anatar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk

<sup>7</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( jakarta: PT Rajawali Persada, 2003). cet. ke-1, hlm. 35.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2014). cet. ke-5 hlm.64.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden<sup>9</sup>.

3) Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen.<sup>10</sup>

#### 6. Analisis data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgon menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>11</sup>

#### 7. Outline

Outline adalah kerangka, regangan atau garis besar. Jadi outline merupakan rencana penulisan yang memuat garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis. Kerangka penulisan terdiri dari :

<sup>9</sup> Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: kencana, 2011), cet. ke-1, hlm.138.

<sup>10</sup> Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2006), Cet Ke- 4. hlm.225.

<sup>11</sup> Sugiyono, *op cit*. hlm. 249.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum tentang Sejarah, Kondisi Geografis, dan Kondisi Demografis Kelurahan Sungai Sibam.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini memuat landasan teori tentang pengertian ketertiban umum, Peraturan Daerah, dasar hukum Peraturan Daerah, pelaksanaan Peraturan Daerah, baik secara umum maupun tinjauan dari fiqh siyasah Dusturiyah

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum salah satunya dalam menertibkan warung remang-remang di wilayah Kota Pekanbaru dan Tinjauan Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum salah satunya dalam menertibkan warung remang- remang di Kelurahan Sungai Sibam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Kelurahan Sungai Sibam

Kelurahan Sungai Sibam merupakan salah satu kelurahan hasil penetapan pemekaran Kelurahan Labuh Baru Barat yang berdasarkan dengan:

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1987 Tanggal 15 Oktober 1987, tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Pemekaran Kabupaten/Kota, serta Peraturan Daerah Nomor. 03 Tahun 2003 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan Payung Sekaki dan Peraturan Daerah Nomor. 04 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kelurahan Labuhbaru Timur dan Kelurahan Labuhbaru Barat dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2016, tentang Pemekaran Kelurahan se-Kota Pekanbaru, maka Lurah Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, menerangkan bahwa :

Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir, maka sejak tanggal 3 Desember 2003 Kelurahan Labuhbaru Barat termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 04 Tahun 2016

Setelah Pelantikan Kepala Kelurahan Sungaisibam pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 dan berkantor di Jalan Beringin No.103 dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

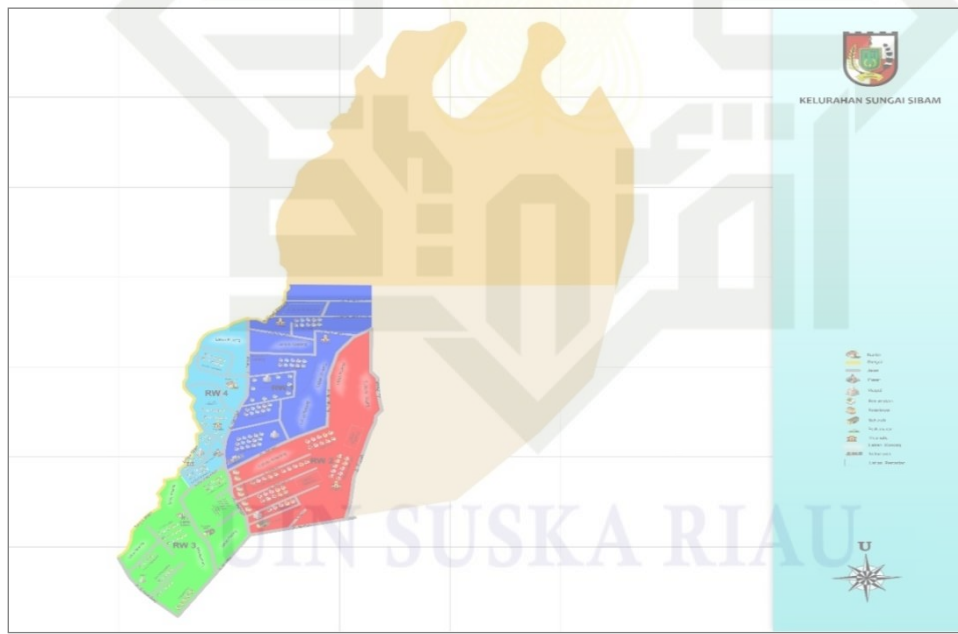
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil tempat di sebuah bangunan Rumah, karena pada saat ini belum ada bangunan kantor dari Pemerintahan Kotamadya Pekanbaru.

Kini Kelurahan Sungaisibam Kecamatan Payung Sekaki telah mampu melayani masyarakat Kota Pekanbaru khususnya masyarakat Sungaisibam baik berupa administrasi kependudukan maupun pengantar perizinan.<sup>12</sup>

### B. Kondisi Geografis dan Demografis Kelurahan Sungai Sibam

Peta Wilayah Kelurahan Sungai Sibam



Sumber: Data Kelurahan Sungai Sibam Tahun 2019

Kelurahan Sungai Sibam memiliki luas daerah  $\pm 5,7 \text{ Km}^2$  dengan batas-batas kelurahan sebagai berikut :

<sup>12</sup> Data Kelurahan Sungai Sibam Tentang Kondisi Geografis Tahun 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Air Hitam (Kelurahan Labuhbaru barat dan Kelurahan Air Hitam).
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Air Hitam Raya (Kec.Tampan)
3. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Punak (Kelurahan Bandar Raya).
4. Sebelah Barat berbatas dengan jalan Garuda Sakti dan Sungaisibam (Kab.Kampar)<sup>13</sup>

**C. Orbitasi**

1. Jarak kelurahan sungai sibam ke ibu kota kecamatan 1 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor 30 menit
3. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 1 jam
4. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota 5 km
5. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor 45 menit

**TABEL II.1**  
**Jumlah penduduk kelurahan sungai sibam**

RW	LUAS WILAYAH ( KM2 )	JUMLAH		JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH ( JIWA )
		RT	KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
RW.01		5	988	1,112	1,201	2.313
RW.02		3	439	532	545	1,077
RW.03		3	792	658	646	1,304

<sup>13</sup> Data Kelurahan Sungai Sibam Tentang Kondisi Demografis Tahun 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RW.04		3	887	940	962	1,902
		14	3,106	3,242	3,354	6,596

*Sumber: Data Kelurahan Sungai Sibam Tahun 2019*

Dari data di atas, dapat kita lihat bahwa Kelurahan Sungai Sibam terdiri dari 04 Rukun Warga (RW), dan memiliki sebanyak 14 Rukun Tetangga (RT). Selain itu di Kelurahan Sungai Sibam memiliki sebanyak 3106 Kepala Keluarga (KK) dengan total keseluruhan penduduk yang berjumlah 6596 jiwa. Kemudian dapat juga kita lihat bahwa ada perbedaan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kelurahan Sungai Sibam populasi laki-laki berjumlah 3242 jiwa dan perempuan berjumlah 3354, artinya jumlah populasi perempuan lebih banyak.<sup>14</sup>

#### **D. Visi Misi Kelurahan Sungai Sibam**

##### **a. Visi Kelurahan Sungaisibam**

Terwujudnya Kelurahan Sungaisibam Tertib Aman dan Santun, Prima dalam Melayani Masyarakat”

##### **b. Misi Kelurahan Sungaisibam**

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat
2. Mewujudkan Ketertiban dalam Masyarakat
3. Meningkatkan pembinaan kepada lapisan Masyarakat
4. Mewujudkan Pola Hidup Bersih dan Sehat.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Data Sensus Penduduk Kelurahan Sungai Sibam Tahun 2019

<sup>15</sup> Data Pemerintahan Kelurahan Sungai Sibam Mengenai Tata Pemerintahan Tahun



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TABEL II.2**  
**Sarana Peribadatan di Kelurahan Sungai Sibam**

Jumlah masjid	14 Buah
Jumlah langgar / surau / musholla	9 Buah
Jumlah gereja Kristen protestan	6 Buah
Jumlah gereja katholik	2 Buah
Jumlah wihara	- Buah
Jumlah pura	- Buah
Jumlah kelenteng	1 Buah

*Sumber: Data Kelurahan Sungai Sibam Tahun 2019*

Dari data di atas, dapat kita lihat bahwa Kelurahan Sungai Sibam memiliki 14 masjid, memiliki surau/musholah 9, gereja protestan 6, memiliki gereja katholik 2 dan 1 bangunan klenteng. Kelurahan Sungai Sibam memiliki lebih banyak tempat beribadah umat muslim dibanding tempat beribadah non muslim.

**TABEL II.3**  
**Prasarana Dan Sarana Pendidikan**

Gedung	2016	2018
Gedung SMA / sederajat	Unit	Unit
Gedung SMP / sederajat	4 Unit	4 Unit
Gedung SD / sederajat	6 Unit	6 Unit
Gedung TK	7 Unit	7 Unit

*Sumber: Data Kelurahan Sungai Sibam Tahun 2019*

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa kelurahan sungai sibam memiliki sarana untuk pendidikan gedung SMP 4 unit gedung SD 6 unit dan gedung TK 7 unit. Sedangkan untuk SMA Kelurahan Sungai Sibam masih belum ada Sesuai dengan pasal 31 Undang-undan Dasar 1945 yang menyatakan tiap-tiap negara berhak untuk mendapatkan pengajaran yang layak. Dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk sistem pendidikan yang dikenal

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lembaga formal dan non formal. Begitu juga halnya di Kelurahan Sungai Sibam terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan,

**TABEL II. 4**  
**Data Kepegawaian Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki**

No	Nama / Nip	Gol.	Jabatan
1.	<u>SARNUBL, M.Si</u> NIP. 19721231 199701 1 001	III/d	LURAH
2.	<u>ROBI BASTIAN, S.Sos</u> NIP. 19821215 201001 1 005	III/b	SEKLUR
3.	<u>WALMAN PAKPAHAN, S.KM</u> NIP. 19680509 199503 1 004	III/c	KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
4.	<u>SITI SUAIDAH, SE</u> NIP. 19751224 200901 2 004	III/b	KASI PEMERINTAHAN KETENTRAMAN & KETERTIBAN
5.			KASI KESEJAH TERAAN SOSIALPEMBANG UNAN DAN PEMBERDAYAAN
6.	<u>YUSLAINI</u> NIP. 19650729 200701 2 002	II/d	STAFF
7.	<u>SYFRINALDO</u>		STAFF

Sumber: Data Kelurahan Sungai Sibam Tahun 2019

#### E. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

##### 1. Sejarah singkat

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mennyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan ketentraman masyarakat. Dalam melaksanakan Peraturan Daerah. Satpol PP bertindak selaku koordinator Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 148 ayat 1 menyatakan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu kepala daerah di dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban di wilayah serta menegakkan atas pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.<sup>16</sup>

Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang pentingnya memelihara ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain memberikan penyuluhan, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja juga melaksanakan tindakan penertiban dengan cara memberikan peringatan secara lisan atau tertulis, tindak cegah dini/ pengaturan, pengawalan dan patroli.

## 2. Tugas, Fungsi, Wewenang Satpol PP

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

<sup>16</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 148 Ayat 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa SATPOL PP itu adalah perpanjangan tangan Kepala Daerah.<sup>17</sup>

**a. Tugas Pokok Satpol PP**

SATPOL PP mempunyai tugas dalam penegakan PEMDA dan PERKADA, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. SATPOL PP yang menduduki jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Fungsi Satpol PP**

Dalam melaksanakan tugas SATPOL PP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.
- d. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa SATPOL PP



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.
- f. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

**c. Wewenang Satpol PP**

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SATPOL PP juga mempunyai Wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap masyarakat, Aparatur/ Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga / masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- c. Fasilitasi dan Pemberdayaan Kapasitas Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- d. Melakukan Tindakan Penyelidikan terhadap Warga Masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang Melakukan Pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan Tindakan *Administrative* terhadap Warga Masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang Melakukan Pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah.<sup>18</sup>

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a) Kepala Satuan;
- b) Sekretaris;
- c) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- d) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e) Bidang Sumber Daya Aparatur;
- f) Bidang Perlindungan Masyarakat;
- g) Unit Pelaksana SATPOL PP Kecamatan;
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamog Praja<sup>19</sup>. Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan tersebut di atas.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP

<sup>19</sup> Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Pelaksanaan Pemerintah Daerah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Tugas Dari Tiap Bagian Satuan Polisi Pamong Praja****1) Kepala satuan polisi pamong praja**

- a) Merencanakan dan merumuskan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Hukum;
- a) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;  
Menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparatur lainnya;
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- d) Melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemerintahan dalam negeri (penegakan peraturan daerah);

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- f) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
- g) Melaksanakan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Walikota;
- i) Membantu pengamanan dan penertiban keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala misal;
- j) Membina dan menyelenggarakan anggota SATPOL PP dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian organisasi;
- k) Membina dan mengawasi pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- l) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- m) Memberi petunjuk kepada bawahan secara tertulis atau lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- n) Mengatur tugas dan pelaksanaan secara prioritas;
- o) Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi dan kunjungan kerja;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p) Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan;
- q) Melaporkan tugas kepada atasan secara berkala baik secara tertulis maupun lisan; Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur akan perundang-undangan.

**2) Sekretaris polisi pamong praja**

- a. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Mewakili kepala Satuan apa Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- e. Mewakili kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- f. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengatur rapat dinas, upacara serta keprotokolan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- i. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- j. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang tata usaha, sandi, telekomunikasi, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan penatausahaan aset dan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- k. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- l. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas tugas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- m. Memfasilitasi tugas-tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- n. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Sesuai dengann tugas dan fungsinya.<sup>20</sup>

Sekretariat terdiri dari :

- i) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- ii) Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan asset
- iii) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Setiap sub bagian sebagaimana diatas dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

### 3) Kepala bidang sumber daya aparatur

- a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang Sumber Daya Aparatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; Melakukan tugas menyelenggarakan upaya-upaya terkait pengembangan kapasitas dan profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait peningkatan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Menyelenggarakan peningkatan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani anggota Satuan Polisi

<sup>20</sup> Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pamong Praja;

- e. Melakukan pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan jasmani anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang sumber daya aparatur;
- g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- i. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- j. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- k. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :

1. Seksi Pelatihan Dasar;
2. Seksi Teknis Fungsional.



Setiap Seksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peraturan Walikota Pekanbaru  
96 Tahun 2016  
30 September 2016

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Strategic University of Science and Technology

**Peraturan Walikota Pekanbaru**  
96 Tahun 2016  
30 September 2016

KELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL

**KEPALA SATUAN**  
**AGUS PRAMONO**  
NIP. 19630323 201404 1 001

**SEKRETARIS**  
**MUHAMMAD FARDAMSYAH, SH**  
NIP. 19640711 199803 1 001

**SUBBAG UMUM**  
**HUBAYA PARLAGUTAN HSB**  
NIP. 19661029 199203 1 002

**SUBBAG KEUANGAN**  
**MARIA ULFA, SH**  
NIP. 19820209 200604 2 011

**SUBBAG PROGRAM**  
**drh. HAMRIA**  
NIP. 19830224 200902 2 004

**PENEGAKAN PERUNDANGAN-  
UNDANGAN DAERAH**  
**FAKHRUDIN, SP**  
NIP. 19790310 201102 1 001

**BIDANG OPERASI DAN KETERTIBAN  
MASYARAKAT**  
**DESHERIYANTO, S.STP, M.Si**  
NIP. 19811218 200112 1 003

**BID. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**  
**M. TAUFIK AZHARI, ST**  
NIP. 19740614 200112 1 004

**SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**SITI HAJAR ABSARI, SE**  
NIP. 19830428 200801 2 008

**SEKSI PENGAWASAN DAN TINDAK INTERNAL**  
**DEDI MULYONO, S.Sos**  
NIP. 19791231 200701 1 008

**SEKSI KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN  
MASYARAKAT**  
**FADLY BUDI PERWIRA, ST**  
NIP. 19810612 200604 1 021

**SEKSI PELATIHAN DASAR**  
**ALFA RIANDI ANWAR, S.STP**  
NIP. 19880526 201010 1 002

**BID. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT**  
**PINAYUNGAN**  
NIP. 19640101 198803 1 016

**SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**  
**DODY ADMAJA, S.IP**  
NIP. 19800323 200801 1 010

**SEKSI KERJASAMA**  
**RAWINTO, SE**  
NIP. 19650611 198803 1 004

**SEKSI SARANA DAN PRASARANA**  
**ASIFUDDIN, SH**  
NIP. 19800629 200701 1 002

**SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**  
**YENDRI DONI, S.Sos**  
NIP. 19770102 200604 1 020

**SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN**  
**HAFID HARTAMIARNO, SE**  
NIP. 19831121 200604 1 002

**SEKSI PENGAMANAN DAN DALMAS**  
**AZWIR, S.Sos**  
NIP. 19750131 200701 1 004

**UNIT PELAKSANA  
SATPOL PP KECAMATAN**

**UPTS**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III LANDASAN TEORI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

#### A. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Pemerintah daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah, memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah.<sup>21</sup>

Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah. Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 237 undang-undang nomor 9 tahun 2015 jo. Undang-undang nomor 23 tahun 2014, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap asa pembentukan dan materi muatan. Serta pembentukan perkara.<sup>22</sup>

#### B. Defenisi Teori Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat

<sup>21</sup> Abu Samah, *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, ( Pekanbaru, Suskapres, 2018), cet. ke-5, hlm. 67.

<sup>22</sup> Rahayu ani sri. *Pengantar pemerintahan daerah*. ( Jakarta: Sinar Grafika, 2018), cet. ke-1, hlm. 112-115.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Teori-teori yang menganalisis tentang hukum, baik dalam tataran normative maupun emperik, cukup banyak, namun yang banyak digunakan oleh para peneliti, diantaranya adalah :

1. Teori keadilan (Justice Theory)
2. Teori Fungsional (Functional Theory)
3. Teori peran (Role Of Theory)
4. Teori Tanggung jawab hukum ( legal Liability Theory)

Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidak berpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari intitusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.

Teori fungsional (Functional Theory) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan berfungsinya intitusi atau norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku dikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Teori peran (Role of law) merupakan theory yang mengkaji dan menganalisis tentang peran dan intitusi-intitusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Teori tangng jawab hukum (Legal Liabilit Theory) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau

<sup>23</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Lansung*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005 ), cet. ke-1, hlm. 27.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau melaksanakan kewajiban atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.<sup>24</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>25</sup>

#### 1. Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945. Selain itu, merujuk pada pasal 236 undang-undang nomor 9 tahun 2015 jo. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang telah menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi Dan Teses*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), cet. ke-2, hlm.1.

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>26</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Fungsi Peraturan Daerah

Merujuk pada undang-undang nomr 9 tahun 2015 jo, undang-undang nomor 23 tahun2014 pemerintahan daerah, mempunyai berbagai fungsi diataranya sebagai berikut.

- a. Sebagai instrument untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar negara republic indonesia tahun 1945 dan undang-undang tentang pemerintahan daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan perturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
- c. Sebagai Penampung kekhususan dan keragaman daearah serta penyalur aspirasi masyarakat didaerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridornya negara kestuan republic Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.<sup>27</sup>

## C. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi

<sup>27</sup> Nî Matul Huda, *Otonomi Daerah*, ( Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), cet. ke- 2, hlm.19.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>28</sup>

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Nurdin Usman *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet. ke-1, hlm. 70.

<sup>29</sup> Abdullah Syukur.. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, ( Ujung Pandang: Persada, 2001), cet. ke-2, hlm. 40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

#### **D. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum**

Kota Pekanbaru melalui pemerintahannya membentuk peraturan daerah mengenai ketertiban umum, yang bertujuan untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah berusaha menekan dan memberantas praktik penyakit sosial yang terjadi di wilayah Pekanbaru. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum di wilayah Kota Pekanbaru. Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat pasal yang secara spesifik menyatakan pelarangan terhadap perbuatan yang meresahkan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Kota Pekanbaru ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru ;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru ;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jalan adalah, Jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya (Selokan, Trotoar, tanda rambu-rambu jalan raya dan sebagainya), yang terbuka untuk umum;
- e. Jalur Hijau adalah, setiap jalur tanah yang terbuka (tanpa bangunan) yang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru;
- f. Petugas Ketertiban Umum adalah Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Dalam peraturan daerah ini terdapat pasal yang secara spesifik menyatakan pelarangan terhadap perbuatan yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut terdapat dalam pasal 24 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dilarang setiap orang melaukan atau menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan di rumah-rumah (Gedung hotel, wisma, penginapan dan tempat-tempat usaha).
2. Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan untuk berada di jalan, taman dan tempat umum.
3. Dilarang bagi setiap orang menyuruh, menganjurkan dengan cara lain orang lain untuk melakukan perbuatan asusila atau perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.<sup>30</sup>

Ketentuan pidana pelanggaran terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pasal 24.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah). Dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**F. Pengertian Ketertiban Umum**

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa mengandung arti luas dan mengandung arti sempit. Yang pertama ketertiban umum dalam arti sempit, menurut arti sempit ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran/ atau bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-perundangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.<sup>31</sup>

Yang kedua yaitu arti ketertiban umum dalam arti luas, penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Sesuai dengan isi dari undang-undang 1945 yang berbunyi” kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

<sup>31</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. ke-2, hlm. 56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

abadi dan keadilan sosial ” jadi maksud dari isi undang-undang dasar 1945 tersebut adalah tentang pentingnya mengatur ketertiban umum”.<sup>32</sup>

**F. Pengertian Warung Remang-Remang**

Menurut kamus bahasa indonesia kata remang mempunyai banyak arti yang justru sangat berjauhan konotasinya. Entah bagaimana asal usulnya remang yang berarti bulu kuduk bisa juga berarti agak gelap, lalu berkembang istilah remang-remang yang artinya agak gelap. Remang-remang jika dipasngkan dengan kata warunng menjadi warung remang-remang. Warung remang-remang berkonotasi sebagai warung yang awalnya berada ditempat yang agak sepi, buka setelah senja, dan biasanya menjual minuman keras(alkohol).selanjutnya warung remang-remang menjadi sebuah “ikon” tempat transaksi berbagai hal, mulai dari minuman keras,narkoba dan juga seks.

Awalnya warung remang-remang begini tumbuh subur di daerah pinggiran kota a tau tempat yang jauh dari keramaian. Tetapi sekarang ada juga yang berdiri dekat pemukiman masyarakat.<sup>33</sup>

**G. Siyasah Dusturiyah**

Dusturi adalah rinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu Ala Al- Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara.” Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan

<sup>32</sup> Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 Alinea Ke 4.

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.

Jadi *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek- aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam al-Quran dan al-Hadist serta tujuan syariat Islam. Disamping itu, perjalanan *ijtihad* para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan. Salah satu kajian *fiqh siyasah dusturiyah* adalah konstitusi madinah atau piagam madinah.

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat, dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap sebagai undang-undang dasar pertama dalam negara islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>34</sup>

Setelah nabi wafat tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman pada prinsip-prinsip Al-Quran dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa Khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Pasca-Khulafa ar-Rasidun, tepatnya pada abad ke-19 setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai

<sup>34</sup> Annas, *Hukum Keadaan Darurat Negara Islam*, Diakses Pada Tanggal 7 Juni 2020 Dari [http:// Insidewinme. Blogspot.Com](http://Insidewinme.Blogspot.Com).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respons terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.<sup>35</sup>

Salah satu aspek dari konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah *Majlis syura* atau *ahl al-halli wa al al-aaqdi*.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke- 1, hlm.51.

<sup>36</sup> Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), cet. ke-2, hlm.19-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN DARI HASIL PENELITIAN

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil kesimpulan mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum dalam penertibkan warung remang-remang di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat kita lihat bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pada Pasal 24 dalam penertibkan warung remang-remang belum dilaksanakan secara efektif dan efisien seperti apa yang diharapkan. Adapun hambatannya adalah dari segi faktor kurangnya sosialisasi dari Satpol PP Mengenai Peraturan Daerah ini, sehingga kurangnya koordinasi baik dari pihak Satpol PP ke Kelurahan maupun dari Satpol PP ke Dinas Sosial yang menyebabkan tidak adanya pembinaan yang dilakukan Oleh Dinas Sosial terhadap perilaku masyarakat yang menyimpang tersebut. Hambatan yang lain adalah penegakan hukum yang kurang tegas dan responsif dari Satpol PP yang menyebabkan masyarakat masih membandel dengan masih mendirikan warung remang-remang. Hal ini pun dapat dilihat dari keadaan di Kelurahan Sungai Sibam masih banyaknya berdiri warung remang-remang.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pada Pasal 24 dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penertibkan warung remang-remang adanya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Fiqh Siyasah. Fiqh siyasah yang berbicara tentang permasalahan ini adalah kaidah siyasah dusturiyah, kaidah ini berbicara tentang membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Hal ini sejalan juga dengan kaidah yang berbunyi:

### 3. تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

**B. Saran**

Mengacu dari hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota pekanbaru untuk responsif dan tegas dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara Satpol PP dan Juga Dinas sosial dalam kurang adanya terjalin komunikasi yang baik, sehingga menimbulkan peraturan daerah tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, tentu saja hal inilah yang menjadi tidak terjalannya peraturan daerah dengan maksimal



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-Buku

A.HAW.Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), cet. ke-2

Tim Redaksi, *Pemerintah Daerah Undang-Undang. Nomor.32 Tahun 2004 Beserta Penjelasannya*,( Jakarta: Ramdina Prakarsa , 2004), cet. ke-1.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), cet. ke-7.

Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Islam* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), Cet. ke-5.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( jakarta: PT Rajawali Persada, 2003). cet. ke-1.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2014). cet. ke-5.

Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:kencana, 2011), cet. ke-1.

Jonatahan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2006), cet. ke- 4.

Data Kelurahan Sungai Sibam Tentang Kondisi Demografis dan geografis Tahun 2019.

Data Sensus Penduduk Kelurahan Sungai Sibam Tahun 2019

Data Pemerintahan Kelurahan Sungai Sibam Mengenai Tata Pemerintahan Tahun 2019

Abu Samah, *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, ( Pekanbaru, Suskapres, 2018),cet. ke-5.

Rahayu ani sri. *Pengantar pemerintahan daerah*. ( Jakarta: Sinar Grafika,2018), cet. ke-1.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Lansung*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005 ), cet. ke-1



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi Dan Teses*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), cet. ke-2.

Ni`Matul Huda, *Otonomi Daerah*, ( Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), cet. ke- 2.

Nurdin Usman *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet. ke-1.

Abdullah Syukur.. *Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”*, (Ujung Pandang: Persada, 2001), cet. ke-2.

M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. ke-2.

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. Ke- 1.

Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), cet. ke-2

Deddy Supriadi Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, ( Jakarta: PT. Rajawali Persada,2004), cet. ke-2.

Al-Mawardi Imam, *al-Ahkam ash-Shulthaniyyah*,(jakarta: qisthi Press, 2014), cet. ke-1.

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan edisi tajwid*, ( Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2016), cet. ke-3.

Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid an-Nuur*(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), cet. ke-2.

**Undang-Undang / Peraturan**

Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor. 05 Tahun 2002, *Tentang Ketertiban Umum pasal 24*.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 148 Ayat 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa SATPOL PP

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 tentang tata pelaksanaan pemerintahan daerah .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pasal 24.

Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 Alinea Ke 4

**Website / Situs**

Annas, *Hukum Keadaan Darurat Negara Islam*, Diakses Pada Tanggal 7 Juni 2020 Dari [http:// Insidewinme. Blogspot.Co](http://Insidewinme.Blogspot.Co)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

1. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Deheriyanto, Bidang Operasi dan ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Dokumentsi wawancara dengan Ibuk Dian, Seksi Bidang Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pekanbaru.



UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dokumentasi wawancara dengan Bapak Agustian, Penyuluh Konseling Penyandang Masalah Sosial, Dinas Sosial Kota Pekanbaru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Robi Bastian, Sekretaris Lurah Sungai Sibam.



UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi wawancara dengan pemilik warung remang-remang di Kelurahan Sungai Sibam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengaitkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripun dengan judul, **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PENERBITAN WARUNG REMANG-REMANG DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH** Yang Ditulis Oleh :

Nama : **DONALIO RAMADHANA**  
NIM : **1624104177**  
Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**

perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Desember 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua : **H. Rahman Aji, M.Ag**

Sekretaris : **Irfan Zulfikar, M.Ag**

Pengujian : **Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag**

Pengujian : **Hendri Sayu, M.Ag**

*(Signatures of the Review Team Members)*

**UIN SUSKA RIAU**

Mengetahui :  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus S. Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jedong Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/30742  
TENTANG



1.04.02.01

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UPP.00/05/2020 Tanggal 11 Februari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : DONALIO RAMADHANA
2. NIM : 11624104177
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
4. Jenis : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian :
  1. DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
  2. SATPOL PP KOTA PEKANBARU
  3. KELURAHAN SUNGAI SIBAM

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 11 Februari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761). 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/658



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/30742 tanggal 11 Februari 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

**DONALIO RAMADHANA**

1162104177

SYAIRAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

HUKUM TATA NEGARA (SIAYASAH)

S1

APAR DESA SUNGAI NANIANG KEC. BUKIK BARISAN KAB. LIMA PULUH KOTA-SUMATERA BARAT

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

1. DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

2. SATPOL PP KOTA PEKANBARU

3. KANTOR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. ...

b. ...

c. ...

d. ...

e. ...

f. ...

g. ...

h. ...

i. ...

j. ...

k. ...

l. ...

m. ...

n. ...

o. ...

p. ...

q. ...

r. ...

s. ...

t. ...

u. ...

v. ...

w. ...

x. ...

y. ...

z. ...

aa. ...

ab. ...

ac. ...

ad. ...

ae. ...

af. ...

ag. ...

ah. ...

ai. ...

aj. ...

ak. ...

al. ...

am. ...

an. ...

ao. ...

ap. ...

aq. ...

ar. ...

as. ...

at. ...

au. ...

av. ...

aw. ...

ax. ...

ay. ...

az. ...

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Februari 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru  
Kepala Politik dan Hubungan Antar Lembaga





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602  
Kode Pos 28125

## SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 460 /DINSOS-REHSOS.2/ 677 / 2020

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

: DONALIO RAMADHANA

NIM

: 1162104177

Fakultas

: SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

Jurusan

: HUKUM TATA NEGARA (SIAYASAH)

Jenjang

: SARJANA (S1)

Alamat

: APAR DESA SUNGAI NANIANG KEC. BUKIK BARISAN  
KAB.LIMA PULUH KOTA-SUMATERA BARAT

Lokasi Penelitian: DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian riset/ pra riset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENERTIBAN WARUNG PEMANG-REANG DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN PAYUNG PEKAKI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH."

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Juli 2020

a.n. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU  
Kabid Rehabilitasi Sosial



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Jenderal Sudirman No. 464 Telp (0761) 31543 - 38765  
Pekanbaru - 28126

## SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 423.6/POL.PP-SEKR/641

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor 071/BKBP-SKP/2020/658 Tanggal 19 Februari 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : DONALIO RAMADHANA

NIM : 1162104177

Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

Jurusan : S.1 HUKUM TATA NEGARA (SIAYASAH)

Bahwa yang bersangkutan di atas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP  
PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI KELURAHAN SUNGAI  
SIBAI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH"**

Demikian Surat Keterangan Pra Riset/Riset/ Penelitian ini keluaran agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 Juli 2020

An. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PEKANBARU  
SEKRETARIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

Jalan Payungsekaki Nomor 35-Telp 0761- 65959, 28292 Pekanbaru

Pekanbaru, 01 April 2020

Kepada

Yth. Sdr. Lurah Sungaisibam

Kec. Payung Sekaki

di

Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8000 PYK - KP / 2020

Surat Keterangan Penelitian

Melindaklanjuti Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor 071/ BKBP- SKP/ 2020/ 658 tanggal 19

Februari 2020, atas nama :

a m a / NIM

DONALIO RAMADHANA /1162104177

akultas

SYAIRAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

urusan / Jenjang

HUKUM TATA NEGARA / S1

alamat

APAR DESA SUNGAI NANIANG KEC. BUKIK BARISAN

udul Penelitian

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 05 TAHUN 2002  
TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENERTIBAN WARUNG REMANG-  
REMANG DI KELURAHAN SUNGAI SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI DITINJAU  
DARI FIQH SIYASAH "

Untuk melakukan Riset/Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2020.
- Berperilaku sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan copy tanda pengenal
- Menyampaikan hasil riset 2 (dua) rangkap kepada Camat Payung Sekaki dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, sesuai Pasal 23 Permendagri Nomor 64 Tahun 2011.

Demikian disampaikan, terima kasih.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rosmiati S. Ag.  
NIP. 19740910200122003

H.  
NIP.